



PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah disingkat RENJA-PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

Mewujudkan Sinkronisasi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan perencanaan teknis perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

BAB II

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN SERTA PENDANAAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Uraian lebih lanjut daftar Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 20 Oktober 2025

BUPATI KOLAKA

TTD

AMRI

diundangkan di Kolaka
pada tanggal 20 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR : 113

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUIKARTINI, SH., MAP
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 113 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2025 – 2029

DAFTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NO	PERANGKAT DAERAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAB KESBANG POL DAN LINMAS
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	DINAS SOSIAL
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22	DINAS PERIKANAN
23	DINAS PARIWISATA
24	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
25	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN
27	SEKRETARIAT DAERAH
28	SEKRETARIAT DPRD
29	INSPEKTUR KAB. KOLAKA
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
35	KECAMATAN WUNDULAKO
36	KECAMATAN KOLAKA
37	KECAMATAN LATAMBAGA
38	KECAMATAN SAMATURU
39	KECAMATAN WOLO
40	KECAMATAN IWOIMENDAA
41	KECAMATAN BAULA

42	KECAMATAN POMALAA
43	KECAMATAN TANGGETADA
44	KECAMATAN POLINGGONA
45	KECAMATAN WATUBANGGA
46	KECAMATAN TOARI

BUPATI KOLAKA

TTD

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum



GIHARTINI, SH., MAP

NIK. 19720826 199311 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayanya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tersebut, yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan target yang kemudian dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan akan mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam perwujudan 9 (Sembilan) program prioritas pembangunan beramal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana Strategis ini, kami mengharapkan masukan konstruktif demi penyempurnaan dokumen Rencana Strategis ini.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal, 20 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Kolaka



Mirdan Athar, S.Pd., ME

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

Nip. 19750514 200312 1 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbang.....	8
2.2. Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan.....	14
2.3. Kinerja pelayanan Balitbang Kabupaten Kolaka	17
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis	41
2.5. Kelompok Sasaran Pelayanan Balitbang	44
2.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 Tujuan	49
3.2 Sasaran.....	49
3.3 Strategi.....	51
3.4 Penahapan Rencana Strategi Balitbang Tahun 2025-2030	52
3.5 Arah Kebijakan.....	53
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	54
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	110
BAB V PENUTUP.....	113

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah	13
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	55

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Jabatan.....	14
Tabel 2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025.....	16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka.....	19
Tabel 2.4 Daftar Hasil Kajian yang Telah dilaksanakan.....	18
Tabel 2.5 Daftar Kajian yang Telah Dimanfaatkan dan Diimplementasikan.....	23
Tabel 2.6 Rencana Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Tahun 2026-2030.....	24
Tabel 2.7 Daftar Inovasi yang Telah Terinput Dalam Innovative Government Award pada BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.....	24
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program / Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020.....	27
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024.....	30
Tabel 2.10 Pemetaan Masalah Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	41
Tabel 2.11 Isu Strategis Badan Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	43
Tabel 2.12 Rencana Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2026-2030.....	45
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	50
Tabel 3.2 Penahapan Renstra BRIDA.....	52
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BRIDA.....	53
Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka.....	59

Tabel 4.2	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029.....	77
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah.....	108
Tabel. 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	111
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kolaka Tahun 2025-2029.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

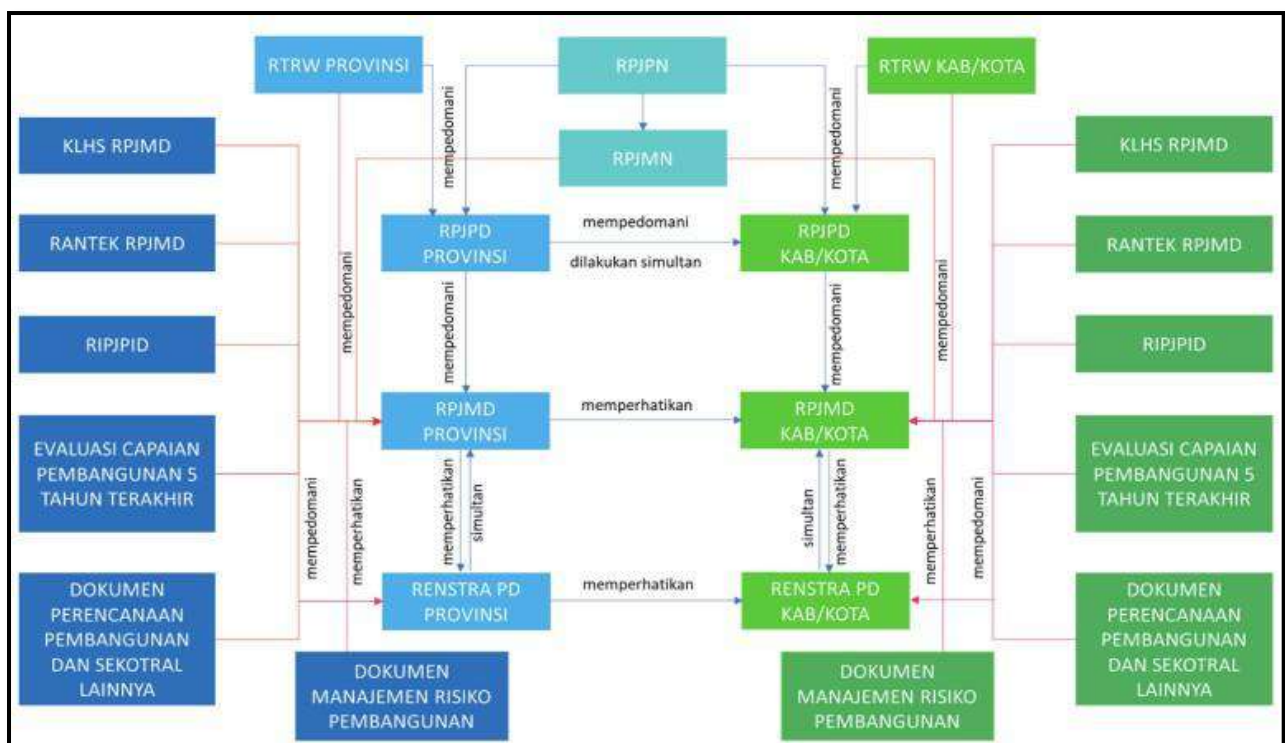
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas dan fungsi.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan penelitian dan pengembangan dengan skala prioritas yang disinergikan dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga Rencana Strategis yang dihasilkan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkelanjutan,

Kedudukan BRIDA sebagai unsur penunjang pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan pada Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan memperhatikan tugas dan fungsi dalam bidang urusan. Rencana Strategis BRIDA juga menetapkan sasaran-sasaran beserta target yang akan dicapai, yang dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasarannya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 melalui perwujudan 9 (Sembilan) program prioritas beramal.

Proses penyusunan Renstra BRIDA Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, Penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BRIDA Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana **Gambar1.1**

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



(Sumber data : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari beberapa tahapan : 1). Penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2). Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta penyusunan program kegiatan dan indikator kinerja, 3). Analisis situasi, 4). Penentuan strategi, program dan kegiatan, 5). Penetapan indikator kinerja, 6). Penyusunan rencana aksi, 7). Pengendalian, monitoring dan evaluasi, 8). Matriks renstra. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Kolaka 2025-2029 juga memperhatikan perencanaan sebagai

alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupetn Kolaka Nomor 3 tahun 2024 tentang Sistem Inovasi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka;
20. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 113 Tahun 2025 Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman dalam melaksanakan program pembangunan daerah sesuai tujuan organisasi.
- b. Kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan pemerintahan dan pembangunan serta mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan terutama pada aspek kegiatan kelitbangan yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan 2025-2029.
- c. Renstra ini juga dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja BRIDA Kabupaten Kolaka.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka adalah sbagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan Pendidikan yang berdaya saing pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- b. Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi aparatur di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil kelibangan dan penerapan inovasi di Kaupaten Kolaka melalui penyediaan tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kelitbangan dan inovasi daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 - 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penulisan renstra BRIDA serta sistematika penulisan.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATGEIS membuat infomasi tentang peran (tugas, fungsi dan struktur organisasi) SKPD dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara singkat apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kinerja pelayanan perangkat daerah serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Stretegi dan Arah Kebijakan perangkat Daerah selama periode Tahun 2025-2029.

- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah lima tahun mendatang.
- BAB V PENUTUP memuat harapan pencapaian target tujuan dan sasaran SKPD untuk tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BRIDA

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kolaka adalah lembaga teknis yang merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi Kewenangan Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka.

Tugas-tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka dilaksanakan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

2. Sekretariat Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas, serta pemberian dukungan teknis administrasi di lingkungan BRIDA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- b. Perencanaan, pengkoordinasian pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional substansi;
- c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, kemandirian dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kemandirian dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja ASN.

Pengelompokan substansi/Kelompok JF di lingkungan Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Substansi program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 2) Substansi keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengelompokan substansi/Kelompok JF di lingkungan BRIDA, terdiri atas :

- 1) Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah. Kelompok JF yang dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - e. Koordinasi system ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok JF pelaksana kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di Daerah. Kelompok JF dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Inovasi dan Inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di Daerah;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Inovasi dan Inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di Daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

- f. Koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tugasnya, BRIDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

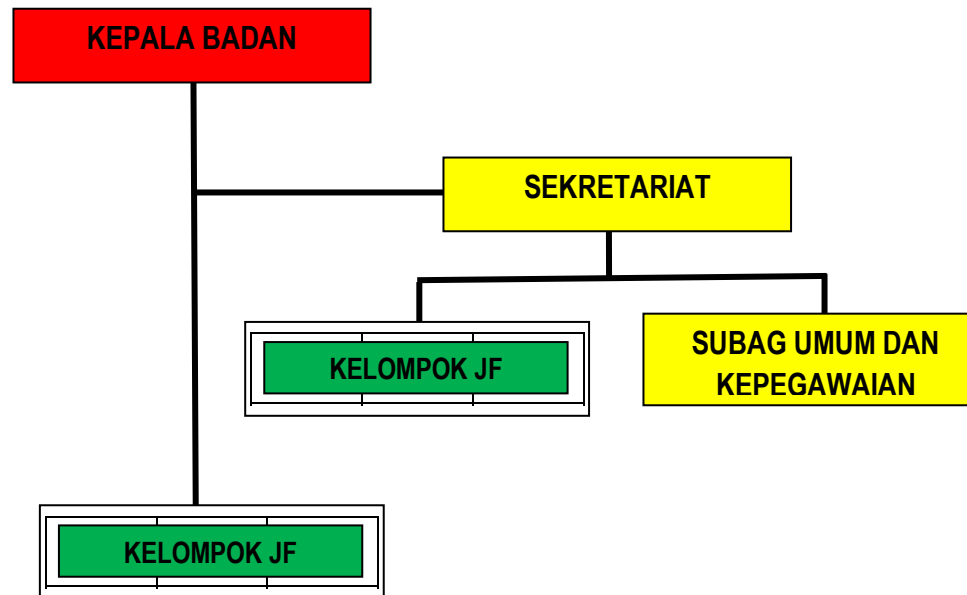
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
- e. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;

- h. Pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan tentang tugas dan fungsi tersebut diatas, maka dapat digambarkan Bagan struktur Organisasi BRIDA sebagaimana pada **gambar 2.1**. di bawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Badan Riset dan Inovasi Daerah

(Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka No. 30 tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka



2.2. Sumber Daya Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur pemerintah atau organisasi menempati posisi strategis yang mewarnai dan menentukan arah kemana suatu daerah atau organisasi akan dibawa. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan terutama tenaga fungsional peneliti, menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah kabupaten Kolaka khususnya bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka disaat ini maupun dimasa yang akan datang, sehingga penelitian mampu menerjemahkan berbagai kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka terhitung Agustus 2025 didukung oleh ASN sebanyak 21 orang yang terdiri dari 16 PNS dan 5 PPPK, serta Non ASN sebanyak 9 orang. Komposisi jumlah pegawai Komposisi jumlah pegawai BRIDA Kabupaten Kolaka dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Namun, dari segi sumber daya manusia, balitbang masih memerlukan penambahan SDM untuk lebih memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat.

Tabel 2.1

Rekapitulasi ASN BRIDA Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Jabatan

JUMLAH PEGAWAI BRIDA					
Kualifikasi Pendidikan		Kepangkatan dan Golongan		Jabatan Struktural/ Fungsional	
Jenjang	(Org)	Pangkat dan Golongan	(Org)	Pejabat	(Org)
Pasca Sajana (S3)	1	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	1	a. Struktural	
Pasca Sajana (S2)	4	Pembina Tk. I, Gol. IV/b	1	- Eselon II	1

Kualifikasi Pendidikan		Kepangkatan dan Golongan		Jabatan Struktural/ Fungsional	
Jenjang	(Org)	Pangkat dan Golongan	(Org)	Pejabat	(Org)
Sarjana / S1	14	Pembina, Gol. IV/a	4	- Eselon III	4
SMA	2	Penata Tk I. Gol.III/d	5	- Eeselon IV	1
		Penata Tk I. Gol. III/c	1	b. Fungsional	
		Penata III/d	2	- Fungsional Perencana Ahli Muda	1
		Pengatur Tk I, II/d	2	- Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1
		IX	5	- Fungsional Perekayasa Ahli Muda	6
				- Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	2
				- Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	2
				- Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama	1
				c. Jabatan Pelaksana	
				- Pengadministrasi Perkantoran	2
JUMLAH	21		21		21

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Agustus 2025

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki BRIDA saat ini berupa kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta peralatan penunjang lainnya yang mendukung kinerja organisasi sebagaimana pada **Tabel 2.2** berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana BRIDA Kabupaten Kolaka Tahun 2025

No.	Nama Barang	Banyaknya (Unit)	Kondisi saat ini
1	Kendaraan Roda 4	3 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	5 Unit	Baik
3	Meja Kerja Biro	3 Unit	Baik
4	Meja Kerja 1/2 Biro	28 Unit	Baik
5	Kursi	75 Unit	Baik
6	Kursi manager	2 Unit	Baik
7	Kursi Jok Putar	9 Unit	Baik
8	Laptop	12 Unit	Baik
9	Komputer/pc	6 Unit	Baik
10	Komputer mini	1 Unit	Baik
11	Printer/scan	12 Unit	Baik
12	Lemari/Rak/Arsip	3 Buah	Baik
13	Lemari piring kaca	1 Buah	Baik
14	Lemari Pustaka	1 Buah	Baik
15	Lemari Etalase	1 Buah	Baik
16	Televisi	1 Buah	Baik
17	Kulkas	1 Buah	Baik
18	Dispenser	2 Buah	Baik
19	AC	3 Buah	Baik
20	Hardiks Eksternal	6 Buah	Baik
21	Infocus	1 Buah	Baik
22	Layar Proyektor	1 Buah	Baik
23	Kamera	1 Buah	Baik
24	Kursi Tunggu	2 Buah	Baik
25	Meja Komputer	4 Buah	Baik
26	Kipas Angin	1 Buah	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

2.3. Kinerja pelayanan BRIDA Kabupaten Kolaka

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kolaka nomor 30 tahun 2025 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kolaka.

Objek (Sasaran Utama) pelayanan adalah perangkat daerah lingkup kabupaten kolaka, Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan amanat peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 4, di sebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan utama
- b. Kelitbangan pendukung

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 5 Permendagri Nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa kelitbangan utama sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;
- d. Perencanaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan
- g. Evaluasi kebijakan

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, antara lain melalui :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;

- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya menunjukkan tingkat capaian program

Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kolaka ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, antara lain:

1. Dokumen hasil kajian-kajian pada bidang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Inovasi dan Teknologi
2. Penyediaan Data Indeks Inovasi Daerah
3. Penyediaan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Penyediaan Data Inovatif Government Award
5. Penyediaan Data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
6. Melakukan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
7. Melakukan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
8. Melakukan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka penelitian dan pengembangan sesuai petunjuk Bupati.

Pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Kolaka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Balitbang	Target NSPK	Target IKK	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018/2019	Target Renstra Bappeda (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)					Rasio Capaian (Tahun)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	-	-	100	100	100	100	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	100	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Balitbang	Target NSPK	Target IKK	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018/2019	Target Renstra Bappeda (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)					Rasio Capaian (Tahun)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Presentase Pemanfaatan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Presentase Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kinerja Pelayanan BRIDA dapat dilihat pada hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan selama periode 2019 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Daftar Hasil Kajian yang Telah dilaksanakan
Tahun 2019-2024**

No	Judul Kajian	Tahun					Ket	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Feasibility Studi Pengembangan Pariwisata Nasional di Kabupaten Kolaka Tahun 2010-2025	√						
2	Penelitian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Berbasis Penguatan Kelompok di Kabupaten Kolaka	√						
3	Kajian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	√						
4	Feasibility Studi Pembangunan Kampus Politeknik Kolaka	√						
5	Kajian Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Home Industry	√						
6	Kajian Pembangunan Bendungan Sungai Poleang	√						
7	Kajian Pembangunan Pabrik Kelapa Dalam	√						
8	Kajian Pembangunan Pabrik Beras Untuk Tujuan Ekspor	√						
9	Kajian Pengembangan Dan Pemanfaatan Hutan Bakau Sebagai Wahana Wisata Edukasi	√						
10	Kajian Potensi Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	√						
11	Kajian Pengembangan Alat Konversi Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif	√						
12	Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Sektor Perdagangan dan Jasa Kota di Kab. Kolaka		√					
13	Penelitian Kondisi Biofisik dan Sosio-Kultural dalam rangka Perencanaan Konsep Pembangunan Kebun Raya di Kabupaten Kolaka		√					
14	Studi Kelayakan Lokasi Kebun Raya di Kolaka		√					
15	Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif			√				

No	Judul Kajian	Tahun						Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
16	Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kab. Kolaka			√				
17	Kajian Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kab. Kolaka			√				
18	Kajian Pola Konsumsi Pangan, Ketersediaan Pangan, dan Status Gizi Masyarakat			√				
19	Kajian Rantai Nilai Komoditas Cengkeh dan Prospek Pengembangannya di Kab. Kolaka			√				
20	Analisis Potensi Pemanfaatan (MSY) Sumber daya Perikanan Tangkap di Kab. Kolaka			√				
21	Kajian Pengembangan Water Front City di Kab. Kolaka			√				
22	Kajian Alat Pemipil Cengkeh			√				
23	Analisis Pengembangan UMKM terhadap Peningkatan pendapatan Asli Daerah Kab. Kolaka				√			
24	Kajian Elektrifikasi Listrik Dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat di Kab. Kolaka				√			
25	Pemekaran Kecamatan Samaturu						√	
26	Untuk Kegiatan Kajian Eksistensi Pemuda dan Keterlibatannya dalam Pembangunan Dilihat dari Gender Analysis Pathway						√	
27	Kajian Potensi Agribisnis Hub dalam Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian di Kabupaten Kolaka						√	
28	Kajian Produk Inovasi Pangan Yang Layak Untuk Diadopsi Kedalam Pelayanan Gizi						√	

Hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi periode 2019-2024 tersebut, kemudian menjadi rekomendasi untuk dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan perangkat daerah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, serta sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan kajian yang telah dilaksanakan. Dalam kurun periode tersebut, telah terdapat hasil-hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh perangkat daerah terkait, yang

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Kajian yang Telah Dimanfaatkan dan Diimplementasikan

No	Nama Kajian	Tahun
1	Feasibility Studi Pembangunan Kampus Politeknik Kolaka	2019
2	Kajian Pengembangan Alat Konversi Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif	2019
3	Penelitian Kondisi Biofisik dan Sosio- Kultural dalam rangka Perancangan Konsep Pembangunan Kebun Raya di Kabupaten Kolaka	2020
4	Studi Kelayakan Lokasi Kebun Raya di Kolaka	2020
5	Kajian Alat Pemipil Cengkeh	2021
6	Pemekaran Kecamatan Samaturu	2024
7	Untuk Kegiatan Kajian Eksistensi Pemuda dan Keterlibatannya dalam Pembangunan Dilihat dari Gender Analysis Pathway	2024

Sesuai Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka, merencanakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030, dimana HAKI merupakan hak hukum untuk melindungi karya dan inovasi intelektual, yang mencegah pihak lain mengklaim, atau menggunakannya tanpa izin, yang bertujuan memberikan penghargaan kepada pencipta, mendorong kreativitas dan inovasi, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan nilai ekonomi, serta melindungi dari pembajakan.

Karya dan inovasi intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan diusulkan untuk perlindungan HAKI berupa kajian dan inovasi yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan, serta basic data (software) yang berupa aplikasi yang dihasilkan baik dari individu maupun kelompok yang akan difasilitasi oleh BRIDA untuk mendapatkan perlindungan produk aplikasi tersebut. Target Rencana Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Tahun 2026-2030, dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Rencana Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Hasil Riset dan Inovasi	3	3	4	5	5
2	Basic Data (Software)	1	1	1	1	1

Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan organisasi daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sesuai kewenangan daerah. Sesuai fungsi BRIDA dalam perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, serta Inovasi dan Teknologi, terdapat inovasi-inovasi yang telah termuat dalam penginputan Innovative Government Award pada BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Daftar Inovasi yang Telah Terinput Dalam Innovative Government Award
pada BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

No	Judul Inovasi	OPD Pelaksana	Tahun Penerapan	Ket
1	Surel BBM	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kolaka	2022	
2	Optimalisasi Pengelolaan Desa Wisata Sani-Sani Melalui Rumah Warga Untuk Meningkatkan Ekonomi Sosial dan Budaya	Dinas Pariwisata Kab. Kolaka	2022	
3	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata Kab. Kolaka	2022	
4	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata Kab. Kolaka	2022	
5	Studio Desain Infrastruktur	Pupr Kab Kolaka	2022	

No	Judul Inovasi	OPD Pelaksana	Tahun Penerapan	Ket
6	Sistem Informasi Kawasan Permukiman Kumuh (Si-Kawanku)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Kolaka	2023	
7	CEGAH STUNTING (SIBOLAN)	Puskesmas Samaturu	2023	
8	IDE JAMU (Input Data Evaluasi Jadi Mudah)	Puskesmas Watubangga	2023	
9	Sistem Informasi Desa (SID)	Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Kolaka	2023	
10	Dapur Sehat Atasi Stunting Kampung KB Dahlia Desa Tanggeau	Puskesmas Polinggona	2023	
11	SI OTAK	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	2023	
12	SADAR UMKM (Satu Data Integrasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kabupaten Kolaka	Dinas Koperasi Kab Dkolaka	2023	
13	Antar Jemput Ibu Bersalin (ANJELI)	Puskesmas Iwoimendaa	2023	
14	SAHABAT CERIA (Sarana Anak Hebat dan Bermain Aman Terpadu – Cerdas, Religius, Amanah)	Puskesmas Kolakaasi	2024	
15	SUMERKAH (Sulap Sampah Menjadi Berkah)	Puskesmas Kolakaasi	2024	
16	Optimalisasi Pelayanan Pasar Murah Berbasis Sistem Informasi "OPERASI EMAS" pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kolaka	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kolaka	2024	
17	Kajian Produk Inovasi Pangan Yang Layak Di Adopsi Untuk Pelayanan Gizi Bagi Masyarakat Di Kabupaten Kolaka	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab Kolaka	2024	
18	Kolaborasi Layanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah (Kolaka Sip Deh)	Dinas Sosial	2024	

Dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan, BRIDA diberikan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan. Anggaran dan realisasi anggaran BRIDA mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga 2024, namun juga ada yang mengalami penurunan. Jika dibandingkan anggaran tahun 2020 dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dimana tahun 2020 anggaran BRIDA sebesar Rp.1.650.205.560 realisasi sebesar Rp.1.641.513.022 dan persentase rasionya sebesar 99.47%, sedangkan tahun 2021 anggaran BRIDA naik menjadi Rp.4.048.288.528 realisasi sebesar Rp.3.924.998.324 dengan persentase rasio sebesar 96.95%. Namun pada tahun 2022 anggaran BRIDA mengalami penurunan menjadi Rp.3.261.211.389 realisasi sebesar Rp.3.213.751.680 dengan Persentase rasio sebesar 98.54%. Pada tahun 2023 hingga 2024 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 menjadi Rp.3.584.857.533 realisasi sebesar Rp.3.509.957.768 dan persentase rasio sebesar 97.91, serta anggaran tahun 2024 sebesar Rp.4.086.739.688 realisasi sebesar Rp. 3.921.463.851 dan persentase rasio sebesar 95.96. Anggaran dan realisasi pendanaan program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.7, dan anggaran dan realisasi pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2024 pada tabel 2.8, sebagai berikut :

Tabel 2.8

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program / Kegiatan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020**

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.650.205.560	1.641.513.022	99,47
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	573.805.500	570,818,544	99,48
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	534.000	51,35
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	1.227.500	840.000	68,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.350.000	4.267.795	67,21
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000	24.000.000	100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.838.000	17.838.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.850.000	4.850.000	100
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	1.980.000	1.980.000	100
Penyediaan Makanan dan Minuman	9.588.000	9.588.000	100
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi luar Daerah	168.886.000	168.880.867	100
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Adm. Perkantoran	113.380.000	113.380.000	100
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi kedalam Daerah	57.780.000	57.774.000	99,99

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyediaan jasa publikasi dan periklanan	3.500.000	3.500.000	100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	142.561.000	142.560.882	100
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	20.825.000	20.825.000	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.487.900	100.157.238	99,67
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.958.000	1.948.000	99,49
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	93.979.900	93.978.238	100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	4.550.000	4.231.000	92,99
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	21.078.300	21.077.000	99,99
Penyusunan Dokumen Pelaporan	10.528.300	10.527.000	99,99
Penyusunan Perencanaan (Renstra/ Renja/ RKA)	10.550.000	10.550.000	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	0

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosialisasi BIMTEK	-	-	-
Program Penyediaan Data Informasi Pembangunan	25.125.000	25.125.000	100
Promosi potensi daerah	25.125.000	25.125.000	100
Program Litbang Sosial dan Pemerintahan	99.437.000	99.437.000	100
Survey Minat Masyarakat Kolaka Mengonsumsi Pangan Lokal Sagu	99.437.000	99.437.000	100
Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan	209.541.860	209.541.860	100
Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Sektor Perdagangan dan Jasa Kota di Kab. Kolaka	120.816.860	120.816.860	100
Survey Kinerja Aparat Bumdes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Kolaka	88.725.000	88.725.000	100
Program Litbang Inovasi dan Teknologi	620.730.000	615.356.380	99,13
Diseminasi Kelitbangan dan Inovasi daerah	120.730.000	117.155.000	97,04
Kajian Kelayakan Lokasi Kebun Raya di Kabupaten Kolaka	100.000.000	100.000.000	100
Penelitian Kondisi Biofisik dan Sosiokultural dalam Perancangan Konsep Pembangunan Kebun Raya di Kabupaten Kolaka	400.000.000	398.201.380	99,55

Tabel 2.9
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024**

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.048.288.528	3.261.211.389	3.584.857.533	4.086.739.688	3.924.998.324	3.213.751.680	3.509.957.768	3.921.463.851	96,95	98,54	97,91	95,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	2.477.086.028	2.663.603.989	3.317.888.733	2.722.540.288	2.423.754.847	2.616.149.736	3.243.506.768	2.571.540.065	97,8	98,22	97,8	94,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	25.333.400	38.482.000	40.000.000	30.000.000	25.333.400	38.482.000	40.000.000	100	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	2.577.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	2.577.000	5.000.000	10.000.000	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.075.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.075.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100	100

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.922.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.922.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.362.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.362.000	4.500.000	5.000.000	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.305.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.305.000	4.500.000	5.000.000	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	3.092.400	14.482.000	5.000.000	5.000.000	3.092.400	14.482.000	5.000.000	100	100	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.916.139.528	1.830.050.500	1.890.146.779	1.799.866.088	1.872.810.033	1.785.813.037	1.832.210.467	1.663.107.836	97,7	98	96,9	92,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.798.728.528	1.701.168.100	1.766.667.379	1.680.910.388	1.755.399.033	1.657.216.637	1.709.159.467	1.547.372.136	97,6	97	96,7	92,06

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	117.411.000	128.882.400	123.479.400	116.972.000	117.411.000	128.596.400	123.051.000	113.752.000	100	100	99,7	97,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	-	-	1.983.700	-	-	-	1.983.700	-	-	-	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.150.000	18.042.000	16.950.000	27.911.800	30.150.000	18.042.000	16.950.000	27.911.800	100	100	100	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.150.000	18.042.000	16.950.000	-	30.150.000	18.042.000	16.950.000	-	100	100	100	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	27.911.800	-	-	-	27.911.800	-	-	-	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.750.000	5.100.000	116.527.000	32.126.000	8.750.000	5.100.000	115.846.347	28.679.100	100	100	99,4	89,27

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.750.000	5.100.000	9.000.000	18.000.000	8.750.000	5.100.000	9.000.000	18.000.000	100	100	100	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	107.527.000	14.126.000	-	-	106.846.347	10.679.100	-	-	99,4	75,60
Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.442.500	447.277.300	584.537.700	320.571.400	238.440.814	447.271.635	584.041.012	318.920.455	100	100	99,9	99,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.489.500	6.891.800	5.698.000	6.085.000	1.489.500	6.891.800	5.698.000	6.085.000	100	100	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.626.000	10.418.000	-	-	14.626.000	10.418.000	-	-	100	100	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.876.000	-	-	-	2.876.000	-	-	-	100	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.750.000	13.499.000	17.354.000	38.938.000	2.750.000	13.499.000	17.354.000	38.875.400	100	100	100	100

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.579.700	6.388.000	7.233.200	7.141.500	15.579.700	6.388.000	7.163.000	7.141.500	100	100	99,0	100
Penediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.489.500	2.789.500	2.007.500	2.007.500	4.489.500	2.789.500	2.007.500	2.007.500	100	100	100	100
Penyediaan Bahan/Material	2.253.000	24.604.000	8.358.000	10.417.400	2.253.000	24.604.000	8.358.000	10.417.400	100	100	100	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.650.000	1.830.000	12.300.000	5.200.000	1.650.000	1.830.000	12.300.000	5.200.000	100	100	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.116.800	352.040.000	491.880.000	193.995.000	178.115.114	352.034.335	491.453.512	193.906.655	100	100	99,9	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.612.000	28.817.000	39.707.000	56.787.000	14.612.000	28.817.000	39.707.000	55.287.000	100	100	100	97,36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.185.000	61.862.000	366.928.254	3.382.000	45.185.000	61.862.000	363.741.869	3.175.000	100	100	99,1	93,88

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	70.236.000	-	-	-	68.797.500	-			98,0	-
Pengadaan Mebel	9.092.000	56.362.000	54.036.754	-	9.092.000	56.362.000	54.036.000	-	100	100	100	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.693.000	5.500.000	113.862.500	3.382.000	33.693.000	5.500.000	113.762.500	3.175.000	100	100	99,9	93,88
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000	-	128.793.000	-	2.400.000	-	127.145.869	-	100	-	98,7	-
Penyediaan Jasa Penunjang Daerah Urusan Pemerintah Daerah	172.220.000	220.868.789	233.518.000	214.018.000	162.220.000	217.657.795	222.737.011	214.018.000	94,2	98,55	95,4	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	700.000	700.000	1.400.000	1.000.000	700.000	700.000	1.400.000	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	42.305.789	35.000.000	20.000.000	-	39.100.000	26.189.001	20.000.000	-	92	74,8	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.420.000	4.920.000	17.868.000	6.144.000	420.000	4.914.795	15.898.010	6.144.000	4,0	100	89,0	100

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.800.000	172.943.000	179.950.000	186.474.000	160.800.000	172.943.000	179.950.000	186.474.000	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.384.000	55.070.000	70.799.000	284.665.000	81.384.000	55.069.869	69.498.062	275.727.874	100	100	98,2	96,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.479.000	52.390.000	63.914.000	91.335.000	74.479.000	52.389.869	62.613.062	83.108.220	100,0	100	98,0	90,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.905.000	2.680.000	6.885.000	3.630.000	6.905.000	2.680.000	6.885.000	3.630.000	100,0	100	100	100
Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	189.700.000	-	-	-	188.989.654	-	-	-	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.601.202.500	597.607.400	266.968.800	1.364.199.400	1.501.243.477	597.601.944	266.451.000	1.349.923.786	93,8	100	99,8	98,95

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	189.160.000	-	-	65.000.000	189.010.000	-	-	62.099.700	99,9	-	-	95,54
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	149.792.000	-	-	-	149.792.000	-	-	-	100,0	-	-	-
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	39.368.000	-	-	-	39.218.000	-	-	-	99,6	-	-	-
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	-	-	-	65.000.000	-	-	-	62.099.700				95,54
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	388.919.000	138.874.000	9.255.800	157.815.000	388.548.000	138.845.359	9.225.800	156.233.700	99,9	99,98	99,7	99,00

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	138.874.000	-	157.815.000	-	138.845.359	-	156.233.700	-	99,98	-	99,00
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	9.255.800	-	-	-	9.225.800	-	-	-	99,7	-
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	195.098.000	-	-	-	194.809.000	-	-	-	99,9	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	193.821.000	-	-	-	193.739.000	-	-	-	100	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	529.323.000	208.062.000	-	150.000.000	508.032.500	208.061.728	-	148.050.000	95,97	100	-	98,70
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	184.182.000	-	-	150.000.000	183.182.000	-	-	148.050.000	99,5	-	-	98,70
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	199.886.000	-	-	-	180.095.500	-	-	-	90,1	-	-	-

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	145.255.000	-	-	-	144.755.000	-	-	-	99,7	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	107.649.000	-	-	-	107.648.800	-	-	-	100	-	-
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	100.413.000	-	-	-	100.412.928	-	-	-	100	-	-
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	493.800.500	250.671.400	257.713.000	991.384.400	415.652.977	250.590.094	257.195.200	983.540.386	84,2	99,97	99,8	99,21
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	70.025.500	-	-	-	53.486.000	-	-	-	76,4	-	-	-
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	146.841.000	-	-	270.999.600	111.236.800	-	-	267.739.550	75,8	-	-	98,80

Uraian	Anggaran (Rp.)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	108.711.000	161.091.400	244.978.000	628.200.000	91.948.277	161.086.144	244.978.000	623.970.736	84,6	100	100	99,33
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	168.223.000	89.580.000	12.735.000	92.184.800	158.981.900	89.503.950	12.217.200,00	91.830.100	94,5	99,92	95,9	99,62

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Kedudukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 30 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka adalah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah yang meliputi Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan serta fasilitasi Inovasi Daerah, tentunya tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Keberadaan OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat krusial untuk membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis evidence, meningkatkan kualitas dan daya saing daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kolaka. Permasalahan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

Tabel. 2.10
Pemetaan Permasalahan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Pengembangan dan keberlanjutan inovasi daerah masih kurang	Masih kurangnya pemahaman tentang tata cara berinovasi
	Pemanfaatan hasil-hasil riset yang belum optimal	Belum maksimalnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menjadi bagian dari perumusan kebijakan
		Masih adanya SKPD yang melakukan kegiatan yang menjadi bagian tusi BRIDA (Penelitian/Kajian, Naskah Akademik).

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum tersedianya SDM Peneliti	Belum tersedianya tenaga fungsional peneliti, sehingga BRIDA Kabupaten Kolaka hanya menggunakan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian melalui Kerjasama swakelola penelitian / pengkajian.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah ini kemudian dituangkan dalam isu strategis yang akan menjadi acuan dalam pencapaian target pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan OPD. Isu strategis Badan Riset dan Inovasi dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini :

Tabel. 2.11
Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan BRIDA	Permasalahan BRIDA	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis BRIDA
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang kaya berpotensi menjadi basis riset yang aplikatif dan inovatif	Pengembangan dan keberlanjutan inovasi daerah masih kurang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Perkembangan Teknologi Demografi Global	Rendahnya Kualitas SDM	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang riset
	Pemanfaatan hasil-hasil riset yang belum optimal	Transformasi Tata Kelola		Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintah		Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Adaptif
	Belum tersedianya SDM Peneliti					Penguatan SDM yang Berdaya Saing
						Peningkatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, fasilitasi inovasi daerah, basis data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi kelitbang

2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan BRIDA

Kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA Kabupaten Kolaka yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga, Akademisi dan Masyarakat Umum.

2.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan

Mitra perangkat daerah adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama agar dapat menghasilkan produk yang memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis untuk penyelesaian masalah nyata di masyarakat dan di bidang terkait, juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta masyarakat umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRIDA Kabupaten Kolaka melakukan kerjasama atau mitra dengan kementerian/lembaga baik negeri maupun swasta sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang. Kerjasama atau mitra tersebut diperkuat dengan adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nota kesepahaman yang menjelaskan pemahaman dan niat awal antara dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi dalam suatu kegiatan, sebelum adanya kontrak yang lebih formal dan mengikat secara hukum.

Beberapa kementerian/Lembaga baik negeri maupun swasta yang telah menjadi mitra atau kerjasama dengan BRIDA Kabupaten Kolaka antara lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Universitas Hasanuddin, Universitas Haluoleo, Universitas Sembilan Belas November, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Politeknik Negeri Ujung Panjang.

Selain melakukan kerjasama atau mitra dengan Kementerian/Lembaga baik negeri maupun swasta, Badan Riset dan Inovasi Daerah juga memiliki rencana pembinaan dan pengembangan inovasi daerah yang berupa pembinaan dan pengembangan inovasi-inovasi daerah untuk mendorong penciptaan budaya inovasi, pengembangan, dan pelembagaan inovasi di tingkat daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemasaran hingga digitalisasi. Target rencana pembinaan dan pengembangan inovasi daerah tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.12

**Rencana Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah
Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Inovasi Daerah dan UMKM	1	1	2	2	2

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan beramal, serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029, yaitu :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOLAKA YANG BERKEADILAN, MAJU DAN UNGGUL “

BERKEADILAN - mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan inklusivitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian yang layak, serta peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi, dapat semakin meningkat. Selain itu, kata kunci BERKEADILAN juga menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya daerah. Kekayaan sumber daya Kabupaten Kolaka tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan juga dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Perumusan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan bersama dan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui mekanisme tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, masyarakat memiliki peran yang aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

MAJU– kondisi ini menggambarkan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian yang kuat, modern, tangguh, serta inovatif. Masyarakat Kolaka memiliki modal sosial yang kokoh dan budaya yang berkembang, sehingga memiliki kemampuan beradaptasi dan ketangguhan dalam menghadapi dinamika masa depan. Perekonomian daerah semakin berkembang, namun tetap memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Kemajuan daerah juga tercermin dari peningkatan kinerja pembangunan di berbagai sektor yang semakin progresif dari waktu ke waktu. Dalam konteks pemerintahan, kemajuan tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga pada pembentukan tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta semakin inovatif dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik. Proses ini didukung dengan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi semua pihak.

UNGGUL – Kemajuan yang dicapai diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Kolaka semakin unggul dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Keunggulan ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam daya saing daerah yang semakin kuat. Unggul juga berarti bahwa pemerintah daerah mampu mencapai standar tertinggi dalam efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang unggul tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan responsif. Dengan tata kelola yang profesional dan inovatif, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Visi tersebut mengandung nilai-nilai dan harapan yang luhur dalam menjalankan pemerintahan sampai dengan kurun waktu lima tahun kedepan, serta mencerminkan komitmen untuk membangun Kabupaten Kolaka melalui pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan untuk seluruh masyarakat, menciptakan pemerintahan yang responsif melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, memberikan layanan publik yang berkualitas serta merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamis, dan berbudaya berbasis kearifan lokal;
- Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel
- Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan;
- Misi 4 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi 5 : Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5 (lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut menjadi acuan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029, berikut tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 sesuai misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Misi	Tujuan RPJMD
Misi 1	: Meningkatkan keharmonisan sosial;
Misi 2	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Berkualitas;
Misi 3	: Meningkatkan daya saing daerah berbasis ekonomi yang inklusif;
Misi 4	: Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
Misi 5	: Terwujudnya kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, serta sesuai Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka termasuk dalam Misi 2.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga memiliki program prioritas yang diberi nama 9 (sembilan) Program Prioritas Pembangunan Beramal, yaitu :

1. Agama dan Budaya;
2. Tata Kelola Pemerintahan;
3. Pemenuhan Akses Pendidikan dan Kesehatan;
4. Peningkatan Struktur Ekonomi Kerakyatan;

5. Peningkatan Konektifitas dan Infrastruktur;
6. Pemenuhan Lapangan Kerja;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penataan Kawasan Perkotaan;
8. Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;
9. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia dan Disabilitas.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka termasuk dalam Program Prioritas kedua yaitu Tata Kelola Pemerintahan, yang kemudian dijabarkan melalui program prioritas BRIDA yang mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, program tersebut yaitu :

1. Program Penelitian dan Pembangunan Daerah;
2. Program Riset dan Inovasi Daerah.

3.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan penelitian dan pengembangan, maka sesuai dengan tujuan jangka menengah, BRIDA Kabupaten Kolaka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.

3.2 Sasaran

Sasaran pembangunan daerah Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kinerja pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan bidang pendidikan, pemerintahan dan pelayanan publik. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan riset,
2. Meningkatnya pengembangan inovasi

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah BRIDA Kabupaten Kolaka beserta indikator kinerjanya disajikan dalam **Tabel 3.1** sebagai berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025 - 2030

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			Nilai SAKIP	65,31	66,85	68,39	69,92	71,46	73,00
		Meningkatkan riset dan inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah	51,51	56,51	61,51	66,51	71,51	76,51
			Meningkatnya pengembangan riset	Persentase Hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	70%	75%	80%	85%	90%	95%
			Meningkatnya pengembangan inovasi	Persentase Hasil Inovasi yang dikembangkan	70%	75%	80%	85%	90%	95%

3.3 Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu, untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta mengatasi permasalahan. Strategi dan kebijakan pada hakekatnya memberikan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran secara konseptual, kualitas, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah tersebut dirumuskan lebih bersifat makro, yang merupakan rangkaian kebijakan atau merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan peningkatan kinerja BRIDA dalam mengemban tugas dan kewenangannya pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh aparatur dan masyarakat, oleh karena itu diperlukan penentuan strategi yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, antara lain :

1. Perumusan tujuan yang jelas dan terukur;
2. Peningkatan kapasitas SDM;
3. Penguatan kerjasama kelitbangan;
4. Pengembangan riset dan inovasi daerah

3.4 Penahapan Rencana Strategis BRIDA Tahun 2025-2030

Penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada langkah-langkah terstruktur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Berikut merupakan tahapan pembangunan yang telah disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2026-2030

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan Fondasi Riset dan Inovasi Daerah :	Riset dan Inovasi Daerah yang Berkeadilan :	Riset dan Inovasi Daerah yang Maju :	Riset dan Inovasi Daerah yang Unggul :	Riset dan Inovasi Daerah yang Berkeadilan, Maju dan Unggul :
Peningkatan kapasitas SDM peneliti dan perekayasa, serta penguatan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan	Penguatan kelembagaan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Pemenuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta peningkatan daya saing daerah	Riset dan inovasi berbasis data dan bukti, serta pembangunan berkelanjutan	Menciptakan pemerintahan yang responsif, inovatif, digitalisasi, dan transformasi teknologi

3.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan BRIDA Kabupaten Kolaka. Adapun arah kebijakan Renstra BRIDA Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPMJD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
	Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan penguatan BRIDA sebagai penggerak ekosistem riset dan inovasi di tingkat daerah. 2. Pengembangan kebijakan daerah yang inklusif dan berbasis pada data dan bukti yang kuat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 2. Melakukan penelitian dan pengembangan sosial dan kependudukan 3. Melakukan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan 4. Melakukan pengembangan inovasi dan teknologi 5. Melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Evaluasi Kebijakan, dan Penerapan 6. Melakukan Inovasi dan Replikasi Inovasi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka, dalam pencapaian tujuan, tugas dan fungsi tersebut, telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, maka perlu penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana yang diamanatkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

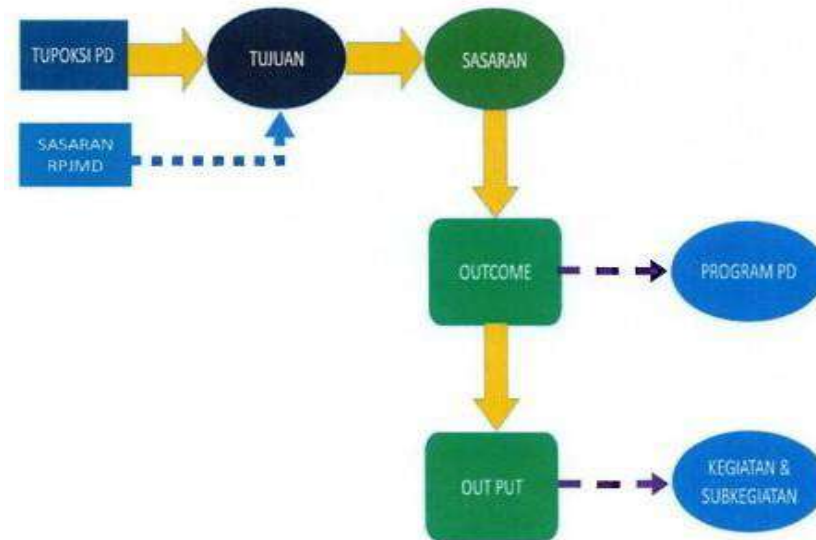
Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

- Program adalah rencana yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Outcome adalah dampak atau hasil yang dihasilkan dari suatu kegiatan, program, atau intervensi.
- Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa kegiatan utama dalam perencanaan meliputi merumuskan tujuan, menganalisis situasi, menentukan alternatif, menyusun langkah konkret (pengembangan rencana aksi) sumber daya manusia, mengalokasikan sumber daya dan mengidentifikasi risiko.
- Sub Kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan yang lebih besar, yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan.
- Output adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan ditampilkan pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan



Sumber : Inmendagri Nomor 2 tahun 2025

4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai Nomenklatur Permendagri

Adapun program Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Pemerintahan.
 - 1) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - 2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - 3) Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
 - 4) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
 - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 - 4) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
 - 5) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 - 6) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - 7) Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
 - 8) Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 9) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
 - 10) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - 11) Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi.
 - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
 - 4) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - 5) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - 6) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 7) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - 8) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - 9) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 - 10) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 - 11) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 12) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- 13) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 - 2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - 3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - 4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
3. Program Riset dan Inovasi Daerah
 - a. Kegiatan Penelitian, pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
 - b. Kegiatan Inovasi dan Inovasi
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah
 - 2) Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah Berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah
 - 3) Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

TABEL 4.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya riset dan inovasi daerah				Persentase kebijakan yang disusun berbasis riset		
		Meningkatnya pengembangan riset			Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil riset		Persentase riset tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase riset tentang pengembangan Program Unggulan Daerah (PUD) yang dimanfaatkan		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya kualitas riset bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase riset tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5.05.02.2.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian	5.05.02.2.01.0014 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Peraturan		
				Meningkatnya kualitas riset Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase riset tentang Bidang Sosial dan Kependudukan yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.05.02.2.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	5.05.02.2.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
				Meningkatnya kualitas riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase riset tentang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan	5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Permukiman	Permukiman	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
				Meningkatnya kualitas riset Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase riset tentang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
		Meningkatnya pengembangan inovasi			Persentase hasil inovasi yang dikembangkan		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan daerah		Persentase Inovasi tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD)		Persentase inovasi tentang pengembangan produk unggulan daerah yang dimanfaatkan		
				Meningkatnya fasilitasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dijalankan sesuai prosedur	Jumlah fasilitasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dijalankan sesuai prosedur	5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5.05.03.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya invensi dan inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	Persentase invensi dan inovasi yang mendukung penyelesaian permasalahan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	5.05.03.2.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	5.05.03.2.02.0004 Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	5.05.03.2.02.0006 Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		Hasil penilaian evaluasi SAKIP perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kinerja SKPD		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya proses administrasi keuangan perangkat daerah		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Terlaksananya proses administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya proses administrasi kepegawaian perangkat daerah		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam merealisasikan target kinerja urusan pemerintahan bidang urusan penelitian dan pengembangan telah ditetapkan pagu indikatif tahun 2025-2029 yang ditampilkan pada table 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4.650.000.000		5.000.000.000		5.100.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB	A	3.290.127.647	A	3.464.490.029	A	3.536.750.000	AA	3.732.350.000	AA	3.890.967.500

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terlaksananya proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7	58.450.000	7	61.372.500	7	64.441.125	7	67.663.181	7	71.046.340
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	1	10.418.625	1	10.939.556
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	1	10.418.625	1	10.939.556

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	1	10.418.625	1	10.939.556
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	8.500.000	1	8.925.000	1	9.371.250	1	9.839.813	1	10.331.803
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	8.500.000	1	8.925.000	1	9.371.250	1	9.839.813	1	10.331.803

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531	1	6.381.408
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1	9.200.000	1	9.660.000	1	10.143.000	1	10.650.150	1	11.182.658
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terlaksananya proses administrasi keuangan perangkat daerah			3	1.901.393.647	3	1.996.463.329	3	2.045.429.277	3	2.147.700.741	1	2.239.188.277
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	21	1.764.311.647	21	1.852.527.229	21	1.901.133.872	21	1.996.190.566	21	2.080.102.593
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	135.000.000	12	141.750.000	12	142.000.000	12	149.100.000	12	156.555.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	12	12	2.082.000	12	2.186.100	12	2.295.405	12	2.410.175	12	2.530.684

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Semesteran SKPD											
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
Terlaksananya proses administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			1	21.924.000	1	23.020.200	1	24.171.210	1	25.379.771	1	26.648.759
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	12	21.924.000	12	23.020.200	12	24.171.210	12	25.379.771	12	26.648.759
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terlaksananya proses administrasi kepegawaian perangkat daerah			2	229.420.000	2	240.891.000	2	243.561.300	2	255.739.365	2	263.526.333
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34	1	27.720.000	1	29.106.000	1	30.561.300	1	32.089.365	1	33.693.833
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	10	201.700.000	10	211.785.000	10	213.000.000	10	223.650.000	10	229.832.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			9	324.496.000	9	343.449.000	9	349.647.088	9	377.691.943	9	393.576.540
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	6.396.000	1	8.000.000	1	8.400.000	1	8.820.000	1	9.261.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	1	36.725.000	1	38.561.250	1	40.489.313	1	42.513.778	1	44.639.467
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	9.810.000	1	10.300.500	1	10.815.525	1	11.356.301	1	11.924.116
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8	12	1.260.000	12	1.500.000	12	1.575.000	12	1.653.750	12	1.736.438

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	1	10.900.000	1	11.445.000	1	12.017.250	1	12.618.113	1	13.249.018
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	5.460.000	12	7.000.000	12	7.350.000	12	7.717.500	12	8.103.375
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	190.000.000	12	199.500.000	12	200.000.000	12	220.562.501	12	228.590.626
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	63.945.000	2	67.142.250	2	69.000.000	2	72.450.000	2	76.072.500

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4	196.000.000	4	207.050.000	4	210.950.000	4	221.497.500	4	232.572.375
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	1	68.000.000	1	71.400.000	1	72.000.000	1	75.600.000	1	79.380.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	3	40.000.000	3	42.000.000	3	44.100.000	3	46.305.000	3	48.620.250
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	4	73.000.000	4	76.650.000	4	77.000.000	4	80.850.000	4	84.892.500

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	2	15.000.000	2	17.000.000	2	17.850.000	2	18.742.500	2	19.679.625
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4	244.320.000	4	259.244.000	4	261.500.000	4	274.575.000	4	285.303.750
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.940.000	1	3.087.000	1	3.100.000	1	3.255.000	1	3.417.750

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	36.000.000	1	37.800.000	1	38.000.000	1	39.900.000	1	41.895.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	5.040.000	1	8.000.000	1	8.400.000	1	8.820.000	1	9.261.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	200.340.000	1	210.357.000	1	212.000.000	1	222.600.000	1	230.730.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	314.124.000	3	333.000.000	3	337.050.000	3	362.102.500	3	379.105.125	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	105.000.000	5	107.000.000	5	108.500.000	5	113.925.000	5	119.621.250
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	17	9.124.000	17	11.000.000	17	11.550.000	17	12.127.500	17	12.733.875

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	200.000.000	1	215.000.000	1	217.000.000	1	236.050.000	1	246.750.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
Meningkatnya pemanfaatan hasil riset												
Persentase riset tentang penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan		n/a										
Persentase riset tentang pengembangan Program Unggulan Daerah (PUD) yang dimanfaatkan		n/a	75	1.075.000.000	80	1.209.507.971	85	1.234.250.000	90	1.399.650.000	95	1.436.300.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan													
Meningkatnya kualitas riset bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan													
Persentase riset tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku			1	50.000.000	1	70.000.000	1	73.000.000	1	82.000.000	1	86.100.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.750.000	1	28.000.000	1	29.400.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	n/a	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.750.000	1	18.000.000	1	18.900.000
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	n/a	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.750.000	1	18.000.000	1	18.900.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	n/a	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.750.000	1	18.000.000	1	18.900.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan												
Meningkatnya kualitas riset Bidang Sosial dan Kependudukan												
Persentase riset tentang Bidang Sosial dan Kependudukan yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku			2	345.000.000	2	379.000.000	2	386.750.000	2	446.000.000	2	458.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	n/a	1	40.000.000	1	42.000.000	1	43.000.000	1	45.000.000	1	46.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	n/a	1	30.000.000	1	33.000.000	1	34.000.000	1	39.000.000	1	40.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	40.000.000	1	45.000.000	1	45.750.000	1	48.000.000	1	50.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	n/a	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.500.000	1	36.000.000	1	37.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	n/a	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.500.000	1	38.000.000	1	39.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	n/a	1	40.000.000	1	42.000.000	1	43.000.000	1	48.000.000	1	49.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	n/a	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.500.000	1	36.000.000	1	37.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n/a	1	25.000.000	11	28.000.000	1	28.500.000	1	36.000.000	1	37.000.000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	n/a	1	40.000.000	1	42.000.000	1	43.000.000	1	48.000.000	1	49.000.000
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	n/a	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.500.000	1	36.000.000	1	37.000.000
Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	n/a	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.500.000	1	36.000.000	1	37.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
Meningkatnya kualitas riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
Persentase riset tentang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku			2	345.000.000	2	393.000.000	2	402.000.000	2	470.000.000	2	483.000.000
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	n/a	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.500.000	1	40.000.000	1	41.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	n/a	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.500.000	1	40.000.000	1	41.000.000
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	n/a	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.500.000	1	38.000.000	1	39.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	n/a	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.500.000	1	32.000.000	1	33.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	n/a	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	n/a	1	40.000.000	1	42.000.000	1	42.500.000	1	48.000.000	1	49.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	n/a	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	n/a	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.500.000	1	40.000.000	1	41.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	n/a	1	30.000.000	1	33.000.000	1	33.500.000	1	40.000.000	1	41.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	n/a	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	n/a	1	25.000.000	1	28.000.000	1	28.500.000	1	32.000.000	1	33.000.000
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	n/a	1	20.000.000	1	25.000.000	1	26.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi													
Meningkatnya kualitas riset Pengembangan Inovasi dan Teknologi													
Persentase riset tentang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dijalankan sesuai kaidah yang berlaku			4	335.000.000	4	367.507.971	4	372.500.000	4	401.650.000	4	409.200.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100.000.000	1	111.507.971	1	113.500.000	1	118.650.000	1	119.200.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2	1	70.000.000	1	78.000.000	1	79.000.000	1	88.000.000	1	90.000.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	90.000.000	1	96.000.000		97.000.000	1	103.000.000	1	105.000.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil	1	1	75.000.000	1	82.000.000	1	83.000.000	1	92.000.000	1	95.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Kelitbangan												
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH													
Meningkatnya pemanfaatan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan daerah		n/a	75	80.000.000	80	91.002.000	85	92.000.000	90	98.000.000	95	100.500.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi untuk mengembangkan produk unggulan daerah (PUD)		n/a	75	204.872.353	80	235.000.000	85	237.000.000	90	270.000.000	95	272.232.500	
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dijalankan sesuai prosedur												
Jumlah fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dijalankan sesuai prosedur			1	80.000.000	1	91.002.000	1	92.000.000	1	98.000.000	1	100.500.000
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	n/a	1	80.000.000	1	91.002.000	1	92.000.000	1	98.000.000	1	100.500.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Invensi dan Inovasi												
Meningkatnya invensi dan inovasi untuk mendukung penyelesaian permasalahan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)												
Persentase invensi dan inovasi yang mendukung penyelesaian permasalahan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)			2	204.872.353	2	235.000.000	2	237.000.000	2	270.000.000	2	272.232.500
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	n/a	1	73.000.000	1	80.000.000	1	81.000.000	1	92.000.000	1	93.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	n/a	1	101.872.353	1	123.000.000	1	123.500.000	1	143.000.000	1	143.232.500
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	n/a	3	30.000.000	3	32.000.000	4	32.500.000	5	35.000.000	5	36.000.000

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	Tata Kelola Pemerintahan	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
			Invensi dan Inovasi
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang menunjukkan kinerja yang akan di capai BRIDA Kabupaten Kolaka dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan daerah sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang terarah, aplikatif dan bermanfaat dalam bidang perekonomian daerah, sosial budaya kemasyarakatan, kinerja aparatur pemerintahan, dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Indikator Kinerja Utama BRIDA yaitu Indeks Inovasi Daerah, Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah, dan Persentase hasil inovasi yang dikembangkan. Ketiga indikator kinerja tersebut merupakan suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana hasil riset dan inovasi dimanfaatkan dan dikembangkan berbagai pihak penerima manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai tolak ukur pencapaian indeks inovasi daerah yang dinilai oleh tiap tahunnya oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Target indikator selama lima tahun mendatang meningkat tiap tahunnya, yang tertuang pada tabel 4.4. sebagai berikut :

Tabel 4.4

**Indikator Kinerja Utama
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	51,51	56,51	61,51	66,51	71,51	76,51	
2	Persentase Hasil riset yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	
3	Persentase Hasil Inovasi yang dikembangkan	%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi fungsi urusan penelitian dan pengembangan dalam suatu instansi pemerintah. IKK ini membantu memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan secara terarah, strategis, dan berdampak nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Target IKK selama lima tahun mendatang adalah 100% tiap tahunnya., yang tertuang pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5

**Indikator Kinerja Kunci
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	100	100	100	100	100	100	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 – 2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BRIDA dalam menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan yang dapat dipergunakan dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kolaka. Rencana Strategis ini diharapkan dapat mendukung visi dan misi Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka.

Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Kolaka merupakan salah satu dokumen pendukung yang akan digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja SKPD sehingga dapat bersinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan program dan sasaran kegiatan yang terukur dengan indikator yang jelas. Selain itu, Rencana Strategis ini juga mencerminkan upaya dalam kesatuan gerak dan langkah yang mengedepankan nilai-nilai profesional, amanah, aspiratif dan partisipatif sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif guna menjamin eksistensi Balitbang dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2025 - 2029, dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kolaka yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2029.